

BAB III

KEBIJAKAN POLITIK SULTAN AKBAR

A. Kondisi Politik Sebelum Sultan Akbar

1. Pada Masa Pemerintahan Zahiruddin Babur (1526-1530 M).

Pada awal kekuasaannya Babur masih mendapat rintangan dari berbagai kalangan umat Hindu dan para pengikut setia Dinasti Lodi. Sebagai keturunan bangsa Mongol, ia merupakan seorang pejuang yang tak kenal lelah baik siang maupun malam untuk mewujudkan keinginannya mendirikan kerajaan Mughal. Sehingga, pemerintahannya diwarnai oleh masa-masa konsolidasi kekuasaan. Dengan kepandaiannya, Babur dapat meredakan berbagai gejolak politik.

Masa pemerintahan Babur ditandai dengan dua persoalan besar yang terjadi, yaitu pada tahun 1526-1527 M kerajaan-kerajaan Hindu melakukan pemberontakan dan mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Kemudian adanya penguasa Muslim yang masih menguasai pemerintahannya di Afghanistan dan masih tetap setia kepada keluarga Lodi. Akan tetapi, kedua persoalan besar tersebut dapat diatasi oleh Sultan Zahiruddin Babur.

Persoalan *pertama* antara pasukan Babur dengan orang-orang Rajput. Dalam upaya untuk mengusir umat Islam dari tanah India dan menetapkan secara penuh aturan Hindu di India, raja-raja Hindu di seluruh wilayah India menyusun strategi angkatan perang yang besar untuk

menyerang kekuasaan Babur.¹ Karena penyerangan Babur dalam pertempuran di Panipat tersebut telah mengguncangkan seluruh Amir-amir Islam dan Maharaja-maharaja Hindu diseluruh tanah Hindustan.²

Dan di awal kekuasaannya harus menghadapi seorang kepala suku Hindu bernama Rana Sangram Singh yang lebih dikenal dengan panggilan Rana Sanga dari kerajaan Mewar. Ia sangat berambisi untuk menghancurkan Babur, karena merasa kecewa dengan keberhasilan Babur yang sempurna dan bertekad untuk memerangi Babur. Sehingga ia berhasil merekrut pasukan yang sangat besar sebanyak 120 orang kepala suku dengan 80.000 orang serdadu berkuda dan 500 serdadu gajah yang siaga untuk bertempur serta para penguasa Marwar, Amber, Gwalior, Ajmer, dan Chanderi, Sultan Mahmud Lodi juga bergabung dengan mereka.³ Oleh karena itu, Rana Sanga merupakan musuh yang lebih hebat daripada Ibrahim Lodi yang hanya memiliki pasukan 100.000 tentara dan 1000 pasukan bergajah.⁴

Melihat pasukan Rana Sanga tersebut Sultan Babur beserta pasukannya merasa panik. Kemudian ia memutuskan untuk membuat suatu langkah dengan berjanji di depan umum untuk tidak minum anggur lagi. Para pasukannya bersumpah dengan kitab suci untuk selalu berada di sampingnya.

¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 147-148.

²Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid 3*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 141.

³Syed Mahmudunnasir, *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 349-350.

⁴Hamka, *Sejarah Umat Islam...*, hal. 141.

Pada 16 Maret 1527 M dalam pertempuran di Khauna, pasukan Babur berjuang dengan keberanian yang luar biasa sehingga dapat mengalahkan barisan-barisan pasukan orang-orang Rajput sedangkan Rana Sanga terbunuh.⁵ Walaupun pasukannya lebih kecil jumlahnya, barangkali karena keperkasaan yang diwarisi leluhur serta prajuritnya yang terlatih dan sangat setia. Babur berhasil tampil sebagai panglima yang memenangkan pertempuran.⁶

Persoalan *kedua* Babur dengan bangsa Afghan. Setelah pasukan Hindu dapat dikalahkan oleh pasukan Babur, sementara itu bangsawan Afghan masih ada golongan yang tetap setia kepada keluarga Lodi. Mereka mengangkat Mahmud Lodi yang merupakan adik kandung dari Ibrahim Lodi menjadi sultan.

Ketika Babur mengalihkan serangannya terhadap bangsa Afghan di sebelah timur. Sultan Mahmud Lodi telah merebut Bihar dan negeri bagian timur sebagian besar telah memihak kepadanya. Kemudian Babur mengirim anaknya yang bernama Aksari untuk melawan pemimpin yang memberontak. Setelah itu Babur sendiri yang menyusul melalui Allahabad, Benares, dan Ghazipur. Jalaluddin Babar Khan Lohari dapat ditundukkan.

Babur menghentikan pengepungan dan menarik diri, sementara tentara Afghan kucar-kacir dan Babur berhasil menduduki Bihar. Sedangkan Mahmud Lodi melarikan diri dan mencari perlindungan kepada

⁵Syed Mahmudunnasir, *Islam...*, hal 349-350.

⁶Fuad, Ah. Zakki, *Sejarah Peradaban Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hal. 199.

Nasrat Shah dari Bengala. Dan Nasrat Shah dengan senang hati mendukung Mahmud, bukan semata-mata karena cintanya terhadap dinasti Lodi melainkan karena takut terhadap Babur, ia merasa khawatir kalau Babur menyerbu Bengala karena ia pernah merebut Bihar. Namun, kekhawatiran Natrat Shah tersebut menjadi kenyataan, pada 6 Mei 1529 M Babur datang menyerbu ke Bengala dan mengalahkan orang-orang Afghan di dalam pertempuran Gogra.⁷

Jadi, dari kedua persoalan tersebut telah membawa hasil yang gemilang dan semakin mantaplah kekuasaannya. Sultan Babur telah berhasil memperluas wilayah kekuasaan politiknya ke wilayah India Utara meliputi Badakhshan, Afghanistan, Punjab, Delhi dataran Bihar, dan wilayah-wilayah yang membentang ke sebelah Selatan hingga garis pertahanan yang ditandai dengan benteng-benteng Biyana, Ranthambhor, Gwalior, dan Chanderi.

Meskipun belum secara penuh daerah-daerah yang terpisah-pisah itu ditundukkannya, artinya daerah-daerah penting kawasan ibukota telah berada di bawah kekuasaan kerajaan Mughal.⁸ Namun ia tidak begitu menikmati hasil dari kemenangannya tersebut.

Setahun kemudian pada tanggal 26 Desember 1530 M ia meninggal dunia. Itulah perkembangan politik yang ada pada masa

⁷Syed Mahmudunnasir, *Islam...*, hal. 350.

⁸Umar Asasuddin Sokah, *Din-I-Ilahi: Kontroversi Keberagamaan sultan Akbar Agung (India 1560-1605)*, cet. I, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1994), hal. 4.

kepemimpinan Babur sebagai raja pertama sekaligus pendiri yang digunakan untuk membangun fondasi pemerintah.

2. Pada Masa Pemerintahan Humayun (1530-1556 M)

Setelah Zahiruddin Babur meninggal dunia di tahun 1530 M, ia digantikan oleh anak pertamanya yang bernama Humayun, yang memerintah selama lebih dari seperempat abad lamanya antara tahun 1530-1556 M. Dia dikenal orang yang rendah hati, gagah berani, cerdas dan cakap, tapi tidak memiliki keterampilan diplomatik.⁹ Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan banyak menghadapi persoalan gerakan desintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya termasuk dari saudaranya sendiri.

Selama masa kepemimpinannya selama sembilan tahun (1530-1539 M) negara tidak pernah aman dan selalu berperang melawan musuh-musuhnya. Sehingga di awal kepemimpinannya Humayun harus menerima sikap perlawanan dari saudara-saudaranya yang menuntut hak untuk memerintah. Seperti saudaranya Kamran datang menyerbu Punjab dan kemudian menguasainya.

Karena kebaikan Humayun terhadap saudaranya tersebut ia pun mengizinkan Punjab dikuasai oleh saudaranya. Sebelum ayahnya meninggal pernah berpesan padanya untuk selalu bersikap baik terhadap saudara-saudaranya.¹⁰ Kemudian salah satu tantangan yang harus ia hadapi

⁹Abd Rahim Yunus dan Abu Haif, *Sejarah Islam Pertengahan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 298.

¹⁰Dipublikasikan Mahasiswa Pascasarjana KI, *Studi Sejarah Peradaban Islam*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2016), hal. 261-262.

adalah pemberontakan dari penguasa Gujarat bernama Bahadur Syah, penguasa yang pernah memisahkan diri dari Delhi.¹¹

Meskipun awalnya Bahadur Shah tidak ada rencana-rencana jahat yang serius terhadap wilayah Delhi dan Agra, namun Bahadur Shah merupakan ancaman besar bagi kerajaan Mughal. Karena ia telah memperluas wilayah kekuasaannya dengan mencaplok kerajaan Malwa yang merupakan kerajaan tetangga. Kemudian Bahadur mengepung benteng Chitor orang-orang Rajput.¹²

Di tahun 1534 M Humayun turun langsung dari istananya untuk menyelesaikan persoalan pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Syah dengan menyerang Malwa di bagian timur Gujarat. Di pertempuran itu, Bahadur Shah mengalami kekalahan dan berhasil melarikan diri untuk mencari perlindungan di pulau Diu, dengan meminta bantuan kepada orang Portugis.

Dan untuk kedua kalinya di tahun yang sama atas bantuan dari orang-orang Portugis, Bahadur berhasil merebut kembali Gujarat dan Malwa. Sehingga kedua Provinsi tersebut terlepas dari kekuasaan kerajaan Mughal.

Kemudian di tahun 1539 M terjadi pertempuran Chausa dekat Buxar, yang melibatkan antara pasukan Humayun dengan pasukan Sher Khan. Dalam pertempuran ini Humayun mengalami kekalahan dan harta

¹¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam...*, hal.148.

¹²Syed Mahmudunnasir, *Islam...*, hal. 351.

kerajaan Mughal jatuh kepada Sher Khan.¹³ Sedangkan Humayun dengan susah payahnya berhasil melarikan diri ke Agra.

Setelah pertempuran Chausa tersebut, Sher Khan menjadi kaisar dengan gelar kerajaan Sher Shah. Kemudian ia memerintahkan pada setiap mata uang yang dicetak bertuliskan namanya dan di setiap khutbah namanya diikutsertakan dalam penyampaian khutbah.

Dengan tekadnya yang sangat kuat itu dan tidak mengenal putus asa, di tahun 1540 M Humayun merebut kembali yang menjadi hak miliknya. Dengan meminta bantuan kepada saudara-saudaranya untuk melawan Sher Khan, akan tetapi mereka tidak mau memberi bantuan apapun kepadanya. Dengan segala upaya yang ada Humayun menyerang kembali orang-orang Afghan di Kanauj. Namun keberuntungan tidak berpihak kepada Humayun, ternyata pasukan Sher Khan jauh lebih kuat dibandingkan pasukannya, sehingga ia mengalami kekalahan dan melarikan diri ke pegunungan Afghan.¹⁴

Setelah itu Humayun pergi ke Persia, disana ia memperoleh bantuan dari Shah Tahmash, sultan kerajaan Syafawi yang berkuasa di masa itu, berupa pasukan berkuda sebanyak 14.000 dengan syarat Humayun harus menyesuaikan diri dengan paham Syi'ah. Dan ia menerima syarat tersebut dan di sanalah ia mengenali paham Syiah dan di masa awal pemerintahan anaknya Akbar itulah pengaruh Syiah begitu besar.

¹³Dipublikasikan Mahasiswa Pascasarjana, *Studi Sejarah Peradaban...*, hal. 262. Lihat juga Syed Mahmudunnasir, *Islam...*, hal. 352.

¹⁴Hamka, *Sejarah Umat Islam...*, hal. 144.

Selama lima tahun (dari tahun 1540 M sampai 1545 M), kerajaan Mughal di bawah kekuasaan Sher Shah dengan gelar kerajaan Fariduddin Abdul Muzaffar Shah. Semasa memerintah ia melakukan pembaharuan di bidang administrasi, keuangan, perdagangan, komunikasi, keadilan, perpajakan dan pertanian di India.¹⁵ Ia memperluas wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Benggala, Bihar, Jaunpur, Delhi, dan Agra. Serta Sind dan Multan yang berhasil direbutnya.

Di Punjab ia mendirikan benteng Ratho, setelah melakukan perdamaian dengan Kamran, saudara Humayun. Ia membagi provinsi-provinsi tersebut menjadi 19 *Saskar* dan menunjuk Amiri Bangala untuk mengkoordinasikan tugas-tugas sebagai *Saskar*.

Kemudian di tahun 1544 M Sher Shah harus menghadapi peperangan melawan Maldev, seorang kepala suku Rathor dari Kerajaan Marwar di Ajmer. Di dalam peperangan tersebut, barisan Sher Shah menyerang dengan tentara yang berkekuatan 80.000 orang dan barisan orang-orang Rajput ini memiliki pasukan tentara yang jauh lebih besar.

Sebagai seorang jendral yang lebih baik, Pasukan Sher Shah dapat membuat barisan orang-orang Rajput kalah dan melarikan diri, sementara pasukan Sher Shah memperoleh kemenangan. Di tahun berikutnya 1545 M Sher Shah mengepung benteng Kalanjar, tetapi dia terbunuh karena ledakan gedung mesiu yang mengenainya. Ia digantikan oleh anaknya bernama Islam Shah, setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan dalam

¹⁵H.G. Rawlinson. *A Concise History of the Indian People* (London: Oxford University Press), hal. 170-171.

keluarga Sur antara Adil Shah dan kedua keponakan Sher Shah Sikandar dan Ibrahim.¹⁶ Berbeda dengan Sher Shah, penguasa sesudahnya adalah penguasa-penguasa yang lemah.

Sehingga kondisi itu Humayun menggunakan kesempatan untuk menguasai kembali Delhi. Atas bantuan dari Shah Tahmasp dari kerajaan Syafawi di Persia, Humayun pun berhasil merebut Kabul dan Kandahar dari saudaranya Kamran dengan syarat menganut Islam Syi'ah sebagai agama kerajaan.¹⁷ Maka, dalam jangka waktu lima tahun sejak kekalahannya di Bilgram pertempuran melawan Sher Shah, Humayun kembali menjadi penguasa wilayah Afghanistan. Setelah itu Humayun dapat merebut Lahore tanpa perlawanan dan mengalahkan Iskandar Shah, dia kembali menduduki Delhi ditahun 1555 M. Setelah banyak percobaan dan perubahan untuk memulihkan tahtanya di Delhi, setahun kemudian Humayun meninggal dunia pada bulan Januari 1556 M karena jatuh dari tangga istananya.¹⁸ Pada saat itu, Akbar sedang berada di medan perang.

Pemerintahan Humayun ini dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode I. Sekalipun Babur berhasil mengamankan Mughal dari serangan musuh, Humayun masih tetap menghadapi banyak musuh dan ia tidak begitu menikmati kekuasaannya.

Sehingga, masa kepemimpinannya kekuasaan hanya sebatas nominal, tidak menunjukkan kemajuan dan perubahan positif bagi rakyat India.

¹⁶Umar Asasuddin Sokah, *Din-i-Ilahi...*, hal. 4

¹⁷*Ibid.*, hal. 4-5

¹⁸Syed Mahmudunnasir, *Islam...*, hal. 353-354.

B. Kebijakan Sultan Akbar

Penerapan kebijakan politik di masa pemerintahan Sultan Akbar, diterapkan guna menyeimbangkan sistem pemerintahan dan legitimasi Mughal atas negara Hindustan. Kebijakan yang diterapkan dalam pemerintahannya sebagian besar berhasil dan mendapat respon positif dari masyarakat walaupun ada yang menyebabkan dinamika dalam roda pemerintahannya. Mudah-mudahan penerapan kebijakan diakibatkan oleh sikap ketoleransian Sultan Akbar dalam menjalankan strategi politik dengan sistem politik *Sulh-e-kul*.

Berbeda dengan sistem kesultanan sebelumnya, kerajaan Mughal di bawah pemerintahan Akbar mengembangkan sistem yang bersifat terbuka, dan menghendaki keterlibatan politik dengan raja-raja Hindu lokal. Keinginan Akbar ini terkabul dengan mengintegrasikan dari berbagai unsur agama, budaya, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat reformasi dalam pemerintahan Sultan Akbar, seperti penghapusan pajak yang memberatkan. Berikut beberapa kebijakan politik Sultan Akbar.

1. Perkawinan

Dengan mengawali perjuangan yang sangat panjang agar terciptanya suatu kedamaian antara masyarakat Muslim maupun non Muslim oleh Sultan Akbar, ternyata meninggalkan pengaruh yang luar biasa mendalam bagi rakyat India. Kakeknya, Babur pernah berwasiat agar dia tidak mempersulit kehidupan rakyat yang tidak Muslim, karena hal itu merupakan cara yang paling bijaksana dalam meringankan masalah-

masalah hukum di India. Adapun beberapa undang-undang yang diciptakan oleh Sultan Akbar, sebagai berikut.

- a. Membolehkan Perkawinan Antar Penganut Agama (*marriage out of the faith*).

Sistem perkawinan di masa pemerintahan Sultan Akbar membolehkan adanya perkawinan antar agama. Laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan Hindu ataupun sebaliknya. Perkawinan seperti ini sudah sering dilakukan oleh para pejabat kerajaan dan rakyat. Di tahun 1562 M, Sultan Akbar sebagai kepala pemerintahan memiliki tujuan untuk membangun sebuah hubungan kerjasama dengan maharaja-maharaja Hindu. Salah satunya kerajaan Amer (Jaipur), ia sendiri menikahi putri seorang Hindu, yang bernama Rajkumari Jodha, ia merupakan putri dari Raja Birbal Mal atau Bharmal.¹⁹ Dengan adanya sistem ini, Sultan Akbar meyakini apa yang dilakukannya merupakan salah satu cara yang dapat menghapuskan ingatan tentang hubungan yang kurang baik antara penguasa Mughal dengan Hindu Rajput.

Perkawinan aliansi pertama ini membawa perubahan besar bagi sikap Sultan Akbar, setiap perbedaan yang dianut menjadikan sikapnya yang semakin toleransi. Mulai dari dibangunnya sebuah kuil di istana dan perayaan hari-hari besar umat Hindu.²⁰ Bahkan, ia memperbolehkan istrinya dan perempuan-perempuan Harem lainnya

¹⁹B. Musidi, *India (Sejarah Ringkas : Dari Prasejarah Sampai Terbentuknya Bangladesh*, (Jakarta: Diandra Primamitra: 2013), hal. 46.

²⁰*Ibid.*

untuk mengerjakan ajaran-ajaran agama mereka di istana dengan sebebaskan-bebasnya. Dan Akbar juga mengundang para pendeta Kristen dan para pendakwah ke istananya untuk berdiskusi dengan para ahli fikih Muslim.

Dengan tetap memegang akidah Islam yang benar. Dia melihat bahwa untuk menjamin kedamaian masyarakat di India, Islam harus menerima unsur-unsur dari luar, baik dari Hindu, Budha, Zoroaster, atau dari agama lainnya.²¹ Tidak diragukan lagi bahwa kesempatan yang diberikan oleh Akbar merupakan langkah yang sangat berani walaupun banyak ahli fikih yang tidak setuju dengannya.

Setelah Sultan Akbar menikahi putri dari Raja Birbal Mal, setiap bangsa Rajput yang telah ditaklukkan, maka raja akan mengawinkan putri dari tiap kerajaan tersebut dengan para bangsawan Mughal maupun sang sultan. Seperti putranya sendiri Jahangir (pangeran Salim) menikahi putri kerajaan Hindu Raja Marwar.²² Sehingga terjalinlah hubungan kekerabatan antara Islam dengan Hindu.

Kemudian, Sultan Akbar memperkuat aliansinya dengan menyambut kerabat laki-laki dari istrinya sebagai bagian dari Mughal dan memberi mereka peran penting dalam pemerintahannya. Seperti Baghwan Das putra Birbal dan cucunya Man Singh diangkat menjadi

²¹Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 261 -262.

²²Maidir Harun, *Hand Out : Sejarah Kebudayaan Islam III*, (Padang: IAIN IB, 2012), hal. 37.

bangsawan kerajaan Mughal dan menempatkannya pada basis kemiliteran Mughal. Hal ini memberikan pengaruh baik bagi Sultan Akbar dan kerajaan Mughal, selain terjalinnya hubungan kekeluargaan antara mereka, juga Mughal mendapat pengaruh besar dari kerajaan Amer (Jaipur).²³

Masuknya orang non Muslim ini kejajaran elit pemerintahan, yang didasarkan sikap ketoleransian Sultan Akbar, mengakibatkan kursi pemerintahan tidak diduduki hanya orang Islam saja, melainkan mereka non Muslim ikut mendudukinya.

Sebab terjalinnya hubungan kerajaan Mughal dengan kerajaan Amer (bangsa Rajput) ini dapat menguntungkan pihak Mughal untuk mendapat bantuan dalam pertahanan militer. Dan taktik seperti ini, maharaja Hindu tidak lagi melakukan keinginan untuk separatism (melepaskan diri) dan malah mempererat hubungan diantara mereka.

Oleh karena itu, pengaruh politik dari aliansi-aliansi ini sangat jauh menjangkau Kekaisaran Mughal untuk mendapatkan loyalitas yang kuat dari kerajaan-kerajaan Hindu. Karena, sistem perkawinan ini membawa para bangsawan Hindu dan Muslim dalam hubungan dekat mengamankan lingkungan sekuler yang lebih baik untuk kekaisaran.

b. Melarang Perkawinan di Bawah Umur

Sultan Akbar mencegah dengan keras membiarkan seorang perempuan hidup di bawah umur 10 tahun menjadi janda karena

²³B. Musidi, *India...*, hal. 46.

kematian suaminya. Dan mencegah adat perkawinan muda yang sangat keras dipegang oleh orang Hindu. Kemudian, dikeluarkan peraturan bahwa jika anak laki-laki diizinkan untuk mengawini si anak perempuan, dengan batasan umur diperbolehkan apabila sudah mencapai 16 tahun dan bagi perempuan setidaknya sudah berumur 13 tahun.²⁴

Sebab apabila terjadi perkawinan di bawah umur yang telah ditetapkan maka, anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut akan beresiko menjadi lemah. Selain itu, adanya peraturan bahwa dilarang melakukan perkawinan dengan saudara sepupu dan keluarga dekat. Sebab, perkawinan seperti itu bisa merusak cinta kasih antar keluarga.²⁵

c. Melarang Adanya Praktek *Sati*

Pada masa pemerintahan Akbar kedudukan perempuan di India dapat menikmati kebebasan yang mendasar kepada keadilan dari ajaran Islam. Perempuan dimuliakan kedudukannya dan pendapatnya dihormati serta memperoleh hak-haknya sebagai pribadi dan anggota masyarakat.²⁶

Hal ini terbukti dari kebijakan Sultan Akbar, yang mengeluarkan larangan membakar diri bersama mayat suaminya (*Sati*), karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, praktek ini secara luas

²⁴Hamka, *Sejarah Umat Islam...*, hal. 151.

²⁵Umar Asasuddin sokah, *Din-i-Ilahi...*, hal. 73.

²⁶Abd. Rahim Yunus dan Abu Haif, *Sejarah Islam Pertengahan...*, hal. 321.

dipraktekkan oleh golongan Brahmana dan anggota suku Rajput.²⁷ Praktek *sati* atau yang dikenal dengan istilah *Pati Obong* di Jawa merupakan praktek pemakaman religius di India. Perempuan yang baru saja menanda secara sukarela untuk ikut membakar dirinya di atas tumpukan kayu api upacara kremasi suaminya.²⁸

Namun, jika seorang perempuan Hindu ingin dibakar bersama mayat suaminya yang telah meninggal, maka tidak ada halangan, tetapi tidak boleh dipaksa.²⁹

d. Melarang Adanya Poligami.

Seseorang laki-laki tidak boleh kawin lebih dari satu istri, kecuali istrinya dalam keadaan mandul. Sebagai aturan yang praktis maka satu Tuhan dan satu istri. Wanita-wanita menopause, hendaknya tidak berkehendak lagi pada suami. Jika para janda ingin kawin lagi, maka hal itu diperbolehkan, walaupun bertentangan dengan ajaran-ajaran orang Hindu.³⁰

Jika seorang wanita lebih tua dari suaminya sebanyak 12 tahun, si suami tidak boleh berdusta terhadapnya. Dan apabila seorang anak gadis didapati berlari sekitar kota apakah pakai kerudung atau tidak, atau jika gadis itu wanita jelek atau bertengkar dengan suaminya, dia

²⁷Jazilus Sakhok, Sejarah: *Gagasan Toleransi Sejagat Sultan Akbar 1542-1605*, hal. 7

²⁸[http://id.m.wikipedia.org/wiki/sati_\(praktik\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/sati_(praktik)), di unduh pada tanggal 06/03/2018, jam 08.14 WIB.

²⁹Umar Asasuddin Sokah, *Din-i-Ilahi...*, hal. 77.

³⁰*Ibid.*, hal. 76-77.

harus dibuang ke tempat prostitusi untuk mengerjakan apa yang di inginkan.³¹

Dengan adanya kebijakan politik Sultan Akbar tentang perkawinan ini, telah menunjukkan penghargaan terhadap perempuan dengan mempunyai posisi yang tidak bisa diabaikan, baik dalam berinteraksi dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun istana.³²

2. Jizyah

Berikut ini beberapa kebijakan Sultan Akbar tentang ditetapkannya undang-undang sistem perpajakan, diantaranya sebagai berikut.

a. Menghapus kewajiban *jizyah* terhadap non Muslim

Jizyah adalah pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non Muslim (*Ahl al-Zimmah*), tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah Islam.³³

Dengan kata lain, *jizyah* merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang laki-laki non-Islam, merdeka, baligh, berakal, sehat, dan kuat, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Sistem *jizyah* sebenarnya telah dilaksanakan beberapa abad sejak masuknya Islam di India oleh penguasa-penguasa Muslim sebelumnya. Di mana pada masa kepemimpinan Muhammad bin Qasim, dan diteruskan oleh Dinasti Ghaznawi, Ghor, Kesultanan

³¹*Ibid.*, hal. 78.

³²Abd. Rahim Yunus dan Abu Haif, *Sejarah Islam Pertengahan...*, hal. 321.

³³Abdul Fatah, dkk., *Ensiklopedi Islam, Jilid 2*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), hal.

Delhi, dinasti Sur dan kerajaan Mughal pada masa pemerintahan Sultan Akbar sistem *jizyah* dihapuskan.³⁴

Pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu di masa pemerintahan Sultan Firoz Shah dari Dinasti Tughluk (1321-1388 M), sistem *jizyah* ini juga pernah diberlakukan bagi orang-orang non Muslim.³⁵ Sementara untuk orang Islam, zakat merupakan bentuk pajak menurut syariat Islam. Dengan demikian pada dasarnya baik Muslim maupun non Muslim memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak.

Pada tanggal 15 Maret 1564 M, Sultan Akbar mengambil langkah yang paling revolusioner dalam memberikan kebebasan beragama kepada umat Hindu dengan menghapuskan sistem *jizyah* yang mengadakan ziarah ke tempat-tempat suci. Penghapusan ini dilakukan oleh Akbar atas dasar bahwa semua orang Hindu tidak harus dilarang melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka.³⁶ Oleh sebab itu, sistem penghapusan *jizyah* terhadap non Muslim ini pada dasarnya untuk memenuhi rasa keadilan terhadap rakyatnya.

Peristiwa tersebut bermula dari uang pengeluaran orang yang melakukan ziarah telah dimanfaatkan oleh Mir-i-Haj selaku inspektur peziarah untuk kepentingannya sendiri. Sehingga Sultan Akbar memberi perintah bahwa siapa saja boleh pergi berziarah dan

³⁴Umar Asasudin Sokah, *Din-i-Ilahi...*, hal. 11

³⁵T. S. G. Mulia, *India: Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan* cet. ke 3, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), hal. 62.

³⁶Saiyid Athar Abbas Rivzi, *Religious and Intellectual History of The Muslim In Akbar's Reign*, (New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1975), hal. 69.

pemerintah akan menanggung biaya-biayanya. Sistem ini berlanjut selama enam tahun, sebelum Sultan Akbar mengetahui siapa yang mengambil uang perbendaharaan itu.³⁷ Selanjutnya, sistem *jizyah* yang dihapuskan itu telah digantikan dengan pajak tanah.

Dalam implementasinya keberpihakan Akbar terhadap kelompok mayoritas Hindu dan Persia, cukup nampak ketika ia menghapuskan pajak kepala (*jizyah*) untuk kafir *dzimmi* di tahun 1579 M. Sehingga ia mengakhiri tradisi Islam yang telah lama berjalan dan mempertahankan hak-hak istimewa untuk umat Islam. Artinya bahwa status Muslim, Hindu dan Persia sama dalam konteks bernegara. Bahkan, penganut Hindu yang diangkat menjadi pejabat negara. Jadi, pada konteks sosial politik Hindu dan Muslim tidak ada perbedaan.³⁸

Akbar berpandangan bahwa tidak ada negara yang akan bertahan lama secara harmonis, ketika ketidakadilan dan perlakuan diskriminasi menimpa sebagian penduduknya. Tindakan yang dilakukan oleh Sultan Akbar ini adalah salah satu titik balik dalam sejarah pemerintahan Muslim di India. Tindakannya yang menghapuskan sistem *jizyah* ini telah menyatukan perbedaan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim.

³⁷Makhanlal Roychoudhury, *The Din-i-Ilahi or The Religioun of Akbar*, (Calcutta University Press, 1941), hal. 78.

³⁸Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Kini*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dan Mariana Ariestuawati, (Jakarta: Serambi Ilmu, 2001), hal. 435.

Penghapusan sistem *jizyah* ini memiliki peran penting karena dapat menghilangkan masyarakat yang hierarkis yang menimbulkan terjadinya perpecahan dan kesenjangan sosial.

b. Mewajibkan Pajak Tanah

Sistem pendapatan tanah kerajaan Mughal sebelum pemerintahan Sultan Akbar belum ada, karena ayahnya Humayun dan kakeknya Babur tidak memperkenalkan perubahan apapun. Di masa pemerintahan keduanya sebagai penakluk pertama lebih memfokuskan terhadap pemberontakan, mengkonsolidasikan kerajaan, dan menjaga ketertiban di bawah kekuasaan Mughal.³⁹

Pajak tanah adalah suatu sumber utama pendapatan yang penting bagi pemerintahan. Peraturan di Hindustan pada waktu itu hampir sama dengan *landrente* di Jawa yaitu pajak menurut luas dan kesuburan tanah.⁴⁰

Dana pemasukan ekonomi kerajaan sebagian besar dari hasil pajak yang diterapkan, guna membantu dana pertumbuhan perekonomian. Selain itu, apabila terjadi krisis ekonomi kerajaan sudah memiliki solusinya dari hasil pajak. Perpajakan kerajaan Mughal di tangani oleh Khwaja Mansur (*diwan-i-tan*) dan Mir Fathulla Shirazi (*diwan-i-khalsa*), yang memiliki tanggung jawab sebagai asisten

³⁹IASPOINT, *Land Revenue System of Akbar*, <https://www.gktoday.in/academy/article/land-revenue-system-of-akbar/> di unduh pada tanggal 21/07/2018, jam 10. 15 wib.

⁴⁰T. S. G. Mulia, *India ...*, hal 62.

diwan-i-tan untuk mencatat data dari data penarikan pajak dan pengeluaran hasil pajak daerah.⁴¹

Sementara itu, tanpa pandang bulu Sultan Akbar mengangkat Todar Mal, seorang Hindu yang sangat cerdas dalam urusan ekonomi sebagai *Diwan-i-Ashraf*.⁴² Pengangkatan Todar Mal, meskipun dia seorang Hindu memiliki implikasi positif terhadap perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Sultan Akbar.

Dengan dibantu oleh Raja Todar Mal, Sultan Akbar menerapkan pajak tanah yang nilainya disesuaikan dengan tingkat kesuburan dan luas tanah.⁴³ Sistem perpajakan diberlakukan secara merata, meliputi propinsi Multan, Lahore, Delhi, Agra, Oudh, dan Allahabad, berlangsung selama abad 17.⁴⁴ Pajak yang dibebankan sesuai dengan pendapatan masyarakat, semakin tinggi jabatan maka pajak yang ditanggung pun semakin besar. Pajak terbesar dibebankan pada pejabat tinggi tingkat distrik (provinsi) dan para *Diwan* (menteri kerajaan) dengan jumlah 1/3 dari hasil gaji. Sedangkan masyarakat yang perekonomiannya kecil seperti petani pemilik tanah diberikan pajak rendah dengan pemberian 1/3 hasil panen, bagi buruh dan petani yang tidak memiliki lahan tidak dibebankan pajak.⁴⁵

⁴¹B. Musidi, *India...*, hal. 48.

⁴²R. C. Majumdar, *An Advanced History of India*, (London: Macmillan and Co., Ltd., 1953), hal. 561.

⁴³Dipublikasikan Mahasiswa Pascasarjana KI, *Studi Sejarah Peradaban Islam*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2016), hal. 271.

⁴⁴Mujtahid, *Dinamika Imperium Mughal: Sistem dan Kebijakan Keagamaan Di Mughal*, 2010, <https://mujtahiduin.wordpress.com/2010/02/19/dinamika-imperium-mughal-sistem-dan-kebijakan-keagamaan-di-mughal/>, di unduh pada tanggal 22-05-2018, jam 13.06 WIB

⁴⁵Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam...*, hal. 150.

Pada pemungutan pajak diperintahkan dengan keras supaya jangan memaksa dan memeras. Apabila terjadi paceklik terhadap ekonomi Mughal dan hasil bumi dalam keadaan musim yang sangat buruk, maka kerajaan dapat mengeluarkan bantuan berupa bibit dan pupuk kepada para petani.

Sultan Akbar juga menyiapkan persediaan untuk memberantas kelaparan, yang sering terjadi menimpa rakyat karena kurangnya hujan turun. Maharaja Hindu maupun Amir Islam, dapat dihukum berat dengan tidak mengenal ampun apabila mereka memeras rakyat yang tinggal dalam tanah wilayahnya.⁴⁶

Sistem pajak yang diterapkan tidak sesuai di dalam wilayah kekuasaannya karena didasarkan pada pembagian wilayah kerajaan menjadi beberapa bagian provinsi (*suba*), wilayah negeri ke kabupaten (*sarkar*), dan kabupaten ke beberapa wilayah kecil (*mahall-mahalla*), yang biasanya selalu sama dengan wilayah tradisional local yang dikenal dengan *pargana*. Cara penilaian kualitas tanah dikenai pajak sesuai dengan kondisi setempat atau wilayah Negara dan juga kabupaten.⁴⁷

Pada tahun 1582 M, Todar Mal memberlakukan sistem pajak baru yang ditetapkan tiap tahun berdasarkan hasil dan statistik harga yang sedang berlaku sehingga anggaran belanja negara itu dengan cara:

⁴⁶Hamka, *Sejarah Umat Islam...*, hal 151.

⁴⁷W. H. Moreland, *From Akbar to Aurangzeb*, (London: Macmillan and Co., Limited ST. Martin Street, 1923), hal. 247.

- 1) Melakukan survei dan pengukuran tanah dengan teliti dan cermat.
- 2) Mengategorikan tanah. Tanah dikategorikan terdiri dari: *Polaj* yaitu tanah yang dapat ditanami setiap tahun; *Parauti*, tanah yang dapat ditanami setelah dikosongkan selama beberapa waktu; *chachar*, tanah yang dibiarkan tidak ditanami 3 sampai 4 tahun; dan *Banjar*, tanah yang dibiarkan tidak ditanami 5 tahun atau lebih. Hanya tanah yang memang diolah yang dapat dikenai pajak.
- 3) Menetapkan harganya. Hasil produksi tanah yang diberikan oleh seorang petani kepada negara 1/3 hasil produksi dan dapat dibayar secara langsung atau tidak langsung.⁴⁸

Meskipun pejabat lokal memiliki peran penting dalam mewakili pemerintahan pusat untuk mengumpulkan pajak, namun hasil pengumpulan pajak tetap dipercayakan kepada seorang Jagirdar. Sebenarnya kebijakan mengenai pajak tanah yang dilakukan oleh Todar Mal pada masa pemerintahan Sultan Akbar ini, sudah pernah diterapkan sebelumnya oleh Sher Shah. Kebijakan yang dilakukan oleh Sher Shah itulah yang menjadi dasar dan dikembangkan kembali di masa Sultan Akbar.

Akbar juga menyatakan bahwa seorang penguasa Muslim dapat menjadi pemimpin golongan Hindu dan Muslim pada masa yang sama. Juga dengan menghilangkan kebencian yang telah berakar antara pemerintahan Muslim dengan masyarakat non Muslim, sehingga

⁴⁸Majumdar, *An Advanced...*, hal. 561.

mereka mempunyai alasan untuk setia terhadap pemimpin mereka. Oleh sebab itulah, ia menerapkan kebijakan terhadap rakyatnya sebagai bukti kecintaanya dan menunjukkan bahwa pemerintahnya secara dasarnya tidak bertentangan dengan Islam.

3. Pendidikan

Pada masa kerajaan Islam Mughal, pendidikan memperoleh perhatian yang cukup besar. Pada mulanya mesjid juga sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat. Di mesjid telah tersedia ulama yang akan memberikan pengajaran barbagai cabang ilmu agama. Bahkan, di mesjid juga telah disediakan ruangan khusus bagi para pelajar yang ingin tinggal di mesjid selama mengikuti pendidikan.⁴⁹

Sistem pendidikan di kerajaan Mughal sebelum pemerintahan Sultan Akbar adalah upaya meningkatkan tingkat intelektual masyarakat. Sistem pendidikan kerajaan Mughal terdiri dari sekolah tingkat dasar, menengah dan universitas. Sekolah pada tingkat dasar terdiri sebuah maktab yang melekat pada sebuah mesjid, yang mengajarkan menulis dan membaca al-qur'an serta aritmatika. Selain itu, ada madrasah di tingkat menengah atau perguruan tinggi.

a. Mendirikan Lembaga Pendidikan

Pada masa kekuasaan Akbar (1556-1605 M), sejumlah madrasah didirikan baik oleh pemerintah maupun individu. Sebuah madrasah dibangun oleh Maham Aqna (ibu pengasuh Akbar) di

⁴⁹Edu-Consultant, Sinopsis: *Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mughal*, 2016, <https://abahsyahida.wordpress.com/2016/06/21/sinopsis-pendidikan-islam-pada-masa-kerajaan-mughal-di-india/>

Fathpur Sikri yang dikenal dengan arsitekturnya. Kurikulum madrasah berisi ilmu pengetahuan umum disamping ilmu pengetahuan agama. Pelajarannya meliputi matematika, agrikultura, geometri, astronomi, fisika, logika, filsafat alam, teologi, sejarah dan pendidikan agama.⁵⁰

Selain itu, pihak kerajaan juga menyediakan perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Akbar dikenal sebagai raja yang gemar membaca dan mengoleksi buku.⁵¹ Ini menunjukkan perhatian dari sejumlah penguasa Mughal terhadap pembinaan agama dengan membangun sejumlah mesjid sangat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan Islam dan ajaran Islam dikalangan masyarakat. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dikalangan para bangsawan, pihak kerajaan juga menyediakan madrasah-madrasah khusus.

Bahkan, Sultan Akbar menerapkan pendidikan atau sekolah khusus disediakan bagi orang Hindu yang disebut *Pat Shala*. Namun demikian, di samping sekolah khusus bagi kelompok agama tertentu, pihak kerajaan juga menyediakan sekolah tempat anak-anak Muslim dan Hindu belajar bersama.⁵²

Hal tersebut ternyata memberikan pengaruh besar di kalangan masyarakat karena semua masyarakat baik itu dari golongan bawah bisa memiliki kesempatan untuk belajar dan memperoleh pendidikan

⁵⁰Taufik Abdullah, et.al, (Ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hal. 298.

⁵¹Edu-Consultant, *Sinopsis: Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mughal...*,

⁵²Taufik Abdullah, et.al, (Ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hal. 297.

di masa muda. Karena didorong dari pengaruh sikap toleransi sesama, Akbar kemudian memberikan peluang belajar bagi orang-orang Hindu di Madrasah.⁵³ Selain itu, dapat mempermudah sosialisasi antara masyarakat Muslim dengan non-Muslim. Untuk menarik simpati para ulama-ulama Muslim, ia juga menghibahkan beberapa madrasah dan perpustakaan.⁵⁴

b. Menciptakan bahasa baru

Negeri Hindustan dikenal sebagai masyarakat yang multikultural, salah satunya dari segi bahasa. Sebelum datang ke India, bangsa Mughal telah dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Sehingga, pada umumnya bahasa Persia digunakan sebagai bahasa sastra.⁵⁵ Di awal pemerintahan Sultan Akbar bahasa yang digunakan ada tiga macam, diantaranya bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa kaum bangsawan, dan bahasa Persia digunakan sebagai bahasa istana dan kesusastraan.⁵⁶

Kemudian, Sultan Akbar memodifikasikan ketiga bahasa tersebut ditambah dengan bahasa Hindu, maka bahasa baru menjadi bahasa Urdhu. Urdhu yang artinya serdadu, bahasa ini terus berkembang sampai sekarang di seluruh India dan terutama di Pakistan.⁵⁷

⁵³Majumdar, *An Advanced...*, hal. 578.

⁵⁴Ira Lapidus, *Sejarah Sosial...*, hal 700.

⁵⁵Ading Kusdiana, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Pertengahan*, cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hal. 243.

⁵⁶Hamka, *Sejarah Umat Islam...*, hal. 152.

⁵⁷Ading Kusdiana, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam...*, hal. 243

Kebijakan Sultan Akbar dalam menciptakan bahasa baru ini untuk mempermudah interaksi masyarakat sesuai dialek antar daerah aliansi kerajaan Mughal dan tidak membedakan saat penggunaan bahasa melalui kelas sosial. Bahasa ini secara cepat digunakan hampir di setiap wilayah kekuasaan Akbar. Dalam perspektif politik, langkah yang diambil oleh Akbar ini dianggap sah dan cerdas. Sebab substansi politik adalah tercapainya tujuan meskipun pada saat bersamaan terdapat aspek-aspek tertentu yang terabaikan.

4. Kehidupan Beragama

Islam bukanlah agama mayoritas di India, kepemimpinan kerajaan Islam di India tidak akan berkembang jika tidak mendapat dukungan dari maharaja-maharaja Hindustan. Sultan Akbar pada mulanya sangat antusias dalam membela dan mengembangkan agama Islam. Hal ini terbukti, masuknya Islam di India tentunya menimbulkan berbagai konflik, hal ini sangat wajar terjadi karena tidak ada masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik, apalagi di masyarakat India yang sangat beragam.

Untuk menghindari terjadinya konflik, Sultan Akbar mendirikan lembaga agama dan menciptakan suatu pembaharuan agama, agar terciptanya stabilitas politik yang baik. Diantaranya sebagai berikut.

a. Mendirikan lembaga *Ibadat Khana*.

Sultan Akbar di kenal sebagai sosok penganut Islam ortodoks yang rajin dalam beribadah dan sangat menghormati ulama. Ia menunaikan shalat lima waktu secara berjama'ah, sering melakukan

azan dan membersihkan mesjid. Pada tahun 1575 M Akbar mendirikan *Ibadat Khana* di Fathpur Sikr, sebagai tempat keperluan diskusi keagamaan yang dirancang hanya untuk kaum muslimin yang terdiri dari para sayyid yang mengambil tempat duduk sebelah Barat, para ulama, bangsawan, dan keluarga istana menduduki sebelah Timur.⁵⁸

Akan tetapi tidak berlangsung lama, tempat itu telah menimbulkan kekecewaan Akbar terhadap para ulama ortodoks. Bermula dari perselisihan mereka mengenai tempat duduk, saling menuduh dan memojokkan lawan, sehingga terjadilah pertikaian agama. Selanjutnya, kekecewaan Akbar memuncak setelah dua tokoh agama istana yaitu Makhdum-ul Mulk⁵⁹ dan Abdun Nabi⁶⁰, menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang Brahmana yang di dakwa mengambil bahan material bangunan untuk mesjid serta mencaci maki agama Islam. Keputusan itu dirasakan tidak manusiawi dengan kejahatan yang dilakukannya dan di kritik oleh para pejabat-pejabat istana terutama golongan Hindu dan juga istri Sultan.⁶¹

Barangkali hal inilah yang menjadi pemicu keretakan antara para ulama dengan Sultan Akbar mengenai interpretasi dan pelaksanaan hukum Islam. Di mana pada mulanya undang-undang negara merupakan wewenang ulama sebagai *Sadrul Sudur*. Sedangkan

⁵⁸Umar Asasuddin Sokah, *Din-i-Ilahi...*, hal. 61.

⁵⁹Ia pernah menadi tokoh penting dalam masa pemerintahan dinasti Sur dan menjadi lebih berkuasa pada masa awal pemerintahan Sultan Akbar. Lihat Umar Asasuddin Sokah hal. 60.

⁶⁰Ia diangkat menjadi *Sadr-ul Sudur* tahun 1565 M dan diberi otoritas kedudukan agama tertinggi di istana.

⁶¹*Ibid.*, hal. 62-63.

kekuasaan Akbar dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan agama masih terbatas. Hingga pada akhirnya, hal ini benar-benar membuat Akbar tidak tahan sehingga dia bercerita kepada Syekh Mubarak, seorang ulama berpikiran bebas yang juga ayah dari Abu Fazl, seorang penulis dan pejabat istana. Syaikh Mubarak menjelaskan menurut undang-undang Islam, jika ada pertikaian pendapat antara ahli hukum, maka kepala pemerintahan Islam mempunyai otoritas dan berhak memilih salah satu pendapat. Keputusan yang diambil oleh seorang raja harus berdasarkan pada al-Qur'an dan haist, serta diutamakan untuk kemaslahatan umat. Dari sinilah kemudian disusun sebuah dokumen 1579 M (*Infallibility Decree of 1579* atau Dekrit Tidak Dapat Berbuat Salah 1579), yang menjelaskan bahwa Akbar mempunyai hak otoritas untuk memilih satu pendapat yang menguntungkan bangsa, jikalau terjadi perselisihan. Selain itu, ia juga berhak mengeluarkan perintah baru, yang tidak hanya sesuai al-Qur'an, tapi menguntungkan bangsa.⁶² Karena itu ia diberi gelar Imam Adil.

Dengan dibukanya dokumen itu, Akbar sebagai pemimpin kerajaan sangatlah toleran dan bagi orang yang beragama Hindu dihormati dan tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam.⁶³ Kemudian, ia membuka *Ibadat Khana* yang semula hanya untuk Islam, setelah itu untuk seluruh agama yang ada di India. Setelah ia berkuasa secara

⁶² *Ibid.*, hal. 66.

⁶³ Hamka, *Sejarah Umat Islam...*, hal. 150-151.

mutlak, ia tidak lagi menghiraukan persoalan dalam dokumen itu. Bahkan, ia mengundang para *pandit* Hindu, *mobed Parsee*, dan *sadhus Jain* untuk menghadiri diskusi agama di *Ibadat Khana*. Di sinilah Sultan Akbar memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat. Namun, menimbulkan pertikaian yang serius ketika para Jesuit mengikuti perkumpulan. Setelah kaum non Muslim mengikuti diskusi agama di *Ibadat Khana*, maka terjadilah pemberontakan di provinsi Jaunpur pada tahun 1579 M.⁶⁴

Namun, Sultan Akbar dapat mengatasi pemberontakan tersebut. Maka, pada 1582 M Sultan Akbar mengumumkan pembaharuan agama yang dirancang sebagai alat politiknya, yaitu melakukan *sijda* atau sujud diperintahkan apabila berhadapan dengan raja.⁶⁵

b. Menciptakan *Din-i-Ilahi*.

Melihat kondisi masyarakat India merupakan sebuah masalah serius bagi seorang penguasa. Dalam hal ini ia berusaha agar tidak terjadinya diskriminasi seperti memaksa pemeluk Hindu masuk ke agama Islam, begitupun sebaliknya. Bahkan, Akbar memperkenalkan suatu pembaharuan yang direncanakan sebagai alat politik yang disebut sebagai *Din-i-Ilahi* pada 1582 M,⁶⁶ yakni sebuah agama sinkretis yang menggabungkan unsur-unsur terbaik dari agama-agama yang ada di wilayah kekaisarannya. Namun unsur-unsur tersebut

⁶⁴Umar Asasuddin Sokah, *Din-i-Ilahi...*, hal. 97-98.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 66-7.

⁶⁶Istilah "*Din-i-Ilahi*" atau dalam literatur Barat disebut dengan *divine religion or divine faith* yang bermakna "agama Tuhan", lihat Ira Lapidus, hal. 456. Menurut Badauni disebut juga *Tauhid-e-Ilahi* atau *Divine Monotheism* dan menganggap Akbar murtad. Ali, *History*, hal. 238.

kebanyakan berasal dari Islam dan Hindu, juga beberapa unsur lainnya diambil dari Kristen, Jainisme, dan Zoroastrianisme.⁶⁷

Din-i-Ilahi adalah alat utama birokrasi Akbar dalam usahanya mencari legitimasi, menciptakan kepemimpinan langsung di bawah komandonya. Para pengikut baru bersumpah untuk mengorbankan jiwa, harta, agama dan kehormatan dalam pelayanan Akbar.⁶⁸ *Din-i-ilahi* bukanlah agama baru, tetapi merupakan suatu perkumpulan keagamaan yang bertujuan agar semua orang masuk perkumpulan itu, terutama pembesar kerajaan baik Islam atau Hindu, dengan loyalitas mereka dan suka berkorban untuk kepentingan Akbar, walau begitu Akbar tidak memaksakan gagasannya itu kepada siapapun juga.⁶⁹

Keberadaan agama *Din-i-Ilahi* ini, dianggap menyudutkan agama raja (Islam). Sikap ketoleransian yang begitu besar menyebabkan para pemuka agama besar Islam dan masyarakat Islam menganggap bahwa dirinya menyimpang dari ajaran agama Islam. Dan dari berbagai konsep dan ajaran yang dikembangkan dalam *Din-i-Ilahi*, beberapa penulis juga menganggap bahwa Akbar telah keluar dari Islam dan membentuk agama baru dengan *Din-i-Ilahi* tersebut.⁷⁰

Din-i-Ilahi lebih sebagai sistem etika dan wadah sosial keagamaan dari pada sebuah agama. Dia menciptakan sebuah sistem yang menguntungkan, sehingga orang-orang yang ia ajak akan tertarik

⁶⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Din-i-Ilahi>, diunduh pada tanggal 02-06-2018, jam 10.13 WIB.

⁶⁸Umar Asasuddin Sokah, *Din-i-Ilahi...*, hal. 83

⁶⁹*Ibid.*, hal. 85

⁷⁰*Ibid.*, hal. 79

dan tidak hanya menjadi bagian dari Mughal, tetapi juga untuk mempertahankan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota *Din-i-Ilahi* yang berjumlah delapan belas orang, terdiri dari para pembesar-pembesar kerajaan dan tokoh-tokoh masyarakat diantaranya Abu Fazl, Faizi, Syekh Mubarak, Ja'far Beg Asaf Khan, Qasim-I Kahi, 'Abdus-Samad, A'zam Khan Koka, Mulla Shah Muhammad, Sufin Ahmad, Sadr Jahan, Mir Sharif, Sultan Khwaja, Mirza Jani, Taqi, Shaikzada dan Birbal. Salah satu dari mereka hanya seorang yang beragama Hindu yang ikut menjadi anggota yaitu Bir Bar. Dan sebagian dari mereka meninggal ketika Sultan Akbar masih Hidup. Setelah Sultan meninggal dunia maka berakhirilah *Din-i-Ilahi*.⁷¹

Sedangkan di kalangan masyarakat percampuran antara Hindu dan Islam telah menciptakan sebuah ajaran baru yaitu *Sikh* yang didirikan oleh Guru Nanak, *Sikh* sendiri terlahir dari pembelotan dari *Din-i-Ilahi*.⁷²

Adapun ciri-ciri *Din-i-Ilahi* di antaranya sebagai berikut.

- 1). Percaya pada keesaan Tuhan.
- 2). Akbar sebagai khalifah Tuhan dan seorang *Padshah* (*al-Insan al-kamil*), ia mewakili Tuhan dimuka bumi dan selalu mendapat bimbingan langsung dari Tuhan, ia terma'shum dari segala kesalahan.
- 3). Semua pemimpin agama harus tunduk dan sujud kepada Akbar.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 92-93.

⁷² Badri Yatim, *op. cit.*, hal. 160-161.

- 4). Sebagai manusia *Padshah*, berpantangan memakan daging. Seperti daging sapi yang dianggap sebagai sesuatu yang suci oleh orang Hindu. Akibat dari pengaruh larangan memakan daging sapi ini, maka di India baik itu orang Islam dilarang untuk menyembelih sapi.
- 5). Menghormati api dan matahari sebagai simbol kehidupan. Dimana kedua simbol tersebut merupakan simbol kehormatan bagi orang Hindu.
- 6). Hari ahad sebagai hari resmi ibadah.
- 7). *Assalamu'alaikum* diganti *Allahu Akbar* dan *Alaikum Salam* diganti *Jalla Jalalah*.⁷³ Para anggota *Din-i-Ilahi* mengucapkan salam dan jawaban salam tersebut apabila berjumpa di jalan atau pertemuan.
- 8). Menyelenggarakan pesta kematian menjelang ajal datang.
- 9). Merayakan hari ulang tahun kelahiran dan memberi sedekah pada acara tersebut.
- 10). Mayat pengikut *Din-i-Ilahi* dibuang ke sungai dan setelah itu baru dibakar. Jika mayatnya dikubur, maka arah kepala si mayat mengarah ke Timur dan kaki mengarah ke Barat.
- 11). Memakai pakaian warna merah, ketika menjenguk orang meninggal dunia.
- 12). Babi dianggap bersih dan boleh dimakan.

⁷³ Ajid Thohir, *op. cit.*, hal. 206.

- 13). Shalat, puasa, meunaikan ibadah haji, mandi *junub*, dan khitanan tidak diwajibkan.
- 14). Belajar bahasa Arab, fikih, tafsir, dan hadits dipandang tidak baik.
- 15). Di mesjid kerajaan tidak boleh dilakukan azan.
- 16). Hari raya 14 kali dalam setahun.⁷⁴

Sedangkan menurut Makhanlal Roychoudhury *Din-i-Ilahi* memiliki sepuluh kebajikan yaitu:

- 1). Kebebasan dan kebaikan.
- 2). Pengampunan dari pelaku kejahatan dan menghadapi kemarahan dengan kelembutan.
- 3). Pantang dari keinginan duniawi.
- 4). Kebebasan dari keduniawian dan serta dalam kekerasan.
- 5). Kebijaksanaan dan pengabdian pada konsekuensi setiap tindakan.
- 6). Kehati-hatian, serta terampil dalam keinginan, dan tindakan yang luar biasa.
- 7). Suara lembut, kata-kata lembut, pidato yang menyenangkan untuk setiap orang.
- 8). Memberikan pengobatan yang baik.
- 9). Sebuah makhluk yang tidak sempurna dan dari kesempurnaan yang Agung.

⁷⁴ Maidir Harun, Hand Out: *Sejarah Kebudayaan Islam III*, (Padang: IAIN IB, 2012), hal. 39-40.

10). Dedikasi jiwa dalam kasih Allah dan penyatuan dengan Tuhan dalam pemelihara semua.⁷⁵

Dengan mempraktekkan kepercayaan tersebut, Akbar mencoba menekankan konsep toleransi beragama dengan menambahkan sebagian aspek Islam dengan tradisi Hindu yang sudah lama melekat di tengah-tengah masyarakat. Melalui penggabungan tradisi tersebut, dapat memperkuat genggamannya atas kerajaan dan menjamin semua rakyat mendapat kesejahteraan.

c. Reaksi Para Ulama tentang *Din-i-Ilahi*

Setelah *Mahzar* (dokumen) di umumkan pada tahun 1579 M, timbul beberapa reaksi dari kalangan Muslim ortodoks karena agama baru ini membawa pengaruh negatif bagin umat Islam. Bahkan, setiap aspirasi mereka untuk menetapkan hukum tidak dihiraukan oleh Sultan Akbar. Pada tahun 1580 M terjadi pemberontakan di wilayah Bangla dan di tahun 1581 M di ikuti oleh Kabul.⁷⁶ Pemberontakan ini oleh sebagian penulis dalam buku Umar Asasuddin Sokah, seorang peneliti dan Guru Besar di Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan bentuk reaksi masyarakat Muslim terhadap sikap dan kebijakan Sultan Akbar yang menurut mereka menyimpang dari ajaran Islam dan juga merugikan kepentingan Islam.

⁷⁵Makhanlal Roychoudhury, M.A., B.L., Sastri, *The Din I Ilahi or The Religioun of Akbar*, (Dipublished University of Calcuta, 1941), hal. 279

⁷⁶K. Ali, *History of India, Pakistan, and Bangladesh*, (Dhaka: Ali Publications, 1980), hal. 219-220.

Kehadiran ajaran *Din-i-Ilahi* telah mengajarkan masyarakat Islam untuk mengikuti cara-cara Kristen yang sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Sehingga dalam pelaksanaan hukum Islam di waktu itu sangatlah rendah. Yang mana sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam kemudian dihalalkan dalam ajaran *Din-i-Ilahi*, seperti daging babi dan minuman keras.

Asal mula terjadinya pemberontakan di Bangla sebenarnya disebabkan dari perilaku kejam dan kasar terhadap rakyat oleh gubernur Muzaffar Khan Turbati. Ia tidak disukai oleh rakyat terutama dari orang-orang *Qaqsyal* (suku Changhtai dari ras Turki) tentang cara penilaian dan peraturan baru mengenai pengambilalihan tanah yang tidak cermat.⁷⁷

Untuk menghentikan pemberontakan di Bangla, Sultan Akbar menyuruh Syekh Mansur untuk melakukan penyelidikan terhadap semua pemegang tanah, apakah haknya masih berlaku atau tidak. Akibat tindakan ini nilai pemegang tanah yang ditetapkan di Bangla meningkat seperempat dan di Bihar seperlima. Akbar juga menyuruh menambah gaji para tentara yang bertugas di Bangla dan Bihar, akan tetapi Syekh Mansur sendiri mengurangi gaji tersebut menjadi 50% di Bangla dan 30% di Bihar. Oleh sebab itu, keputusan tersebut telah membuat para ulama terkejut dengan tindakan yang tidak berlaku adil.⁷⁸

Selanjutnya timbul reaksi dari tokoh terpengaruh di kerajaan, salah satunya adalah Syekh Farid. Ia merupakan orang kepercayaan Akbar dan

⁷⁷ Umar Asasuddin Sokah, *Din-i-Ilahi...*, hal. 99.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 101.

di angkat sebagai pengawas *dargah* (tempat tinggal para sufi bersama dengan para pengikutnya) di Ajmer.⁷⁹ Reaksinya terletak pada sikap kesederhanaannya dalam menyelesaikan berbagai masalah, ia banyak mendapat penghargaan karena ketulusannya. Meskipun ia mendapat kedudukan yang baik di pemerintahan, ketika terjadi diskusi di *Ibadat Khana* ia tidak memihak kepada siapa pun, baik itu Akbar maupun kaum ulama ortodoks. Akan tetapi, pada akhirnya ia bergabung pada Khwaja Baqi Billah yang datang bermukim untuk mengajarkan pembaharuan ke Delhi tahun 1599 atau 1600 M. Selanjutnya Syekh Farid menjadi media penghubung untuk menyebarkan pengaruh Khwaja ini di antara para bangsawan.⁸⁰

Setelah itu, timbul reaksi dari seorang sufi bernama Syekh Ahmad Sirhindi, ia menentang keras kebijakan agama Sultan Akbar. Penentangan Ahmad terhadap kebijakan agama Akbar terlihat dari surat-surat yang dikirimnya kepada Syekh Farid. Pada awalnya isi surat itu berisi ungkapan keprihatinan Syekh Ahmad terhadap posisi umat Islam yang menurutnya tertindas oleh orang non Muslim.

Dalam suratnya diungkapkan bahwa orang-orang non Muslim melakukan praktek keagamaan mereka dengan sebebas-bebebasnya, sedangkan orang Islam sama sekali tidak sanggup menjalankan ajaran agama sendiri. Bahkan, mendapat caci maki dan penghinaan.

⁷⁹*Ibid.*, hal. 105.

⁸⁰*Ibid.*, hal. 108-109.

Melihat situasi seperti itulah Syekh Ahmad memendam rasa kebencian terhadap Akbar dan orang non Muslim. Ia yakin bahwa perhatian yang di berikan oleh Akbar pada orang Hindu dalam pemerintahannya telah menjadikan mereka berani. Dalam sejumlah suratnya Syekh menyatakan penyesalan terhadap penghapusan *jizyah* dan mendesak untuk menetapkan kembali. Dan ia juga mendesak untuk menghapuskan larangan menyembelih sapi. Kemudian, ia memberi saran kepada para bangsawan Muslim untuk tidak bekerja sama dengan orang-orang di luar agama Islam dan Islam non ortodoks, termasuk Syi'ah.⁸¹



UIN IMAM BONJOL
PADANG

⁸¹*Ibid.*, hal. 111-112.